



PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2025

Raditya Aldiansyah^{1*}, M Ramadhan Caesar², Ica Aprilia Safitri³, Juleha⁴, Nurlaili⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, provinsi lampung, indonesia

*Penulis Korespondensi: raditaldi29@gmail.com; Ramadhan8104@gmail.com; icaaprla12@gmail.com,
julehabae118@gmail.com; nurlaili@radenintan.ac.id

Abstract: *Regional economic growth is an important indicator in measuring the success of regional development. One of the factors influencing regional economic growth is the government's ability to manage regional finances, particularly through local tax revenues and balancing funds. This study aims to analyze the effect of local taxes and balancing funds on the economic growth of Bandar Lampung City during the 2016–2025 period. The research employs a quantitative method with a descriptive approach and multiple linear regression analysis. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), and the financial reports of the Bandar Lampung City Government. The results of the t-test indicate that the local tax variable has a positive and significant effect, while the balancing fund variable has a negative and significant effect on economic growth in Bandar Lampung City. Simultaneously, the local tax and balancing fund variables have a significant effect on the economic growth of Bandar Lampung City.*

Keywords: *local taxes, balancing funds, economic growth, regional finance.*

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, khususnya melalui penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2016–2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hasil uji t pada penelitian mengemukakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung. secara simultan variabel pajak daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung

Kata Kunci: pajak daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, keuangan daerah.

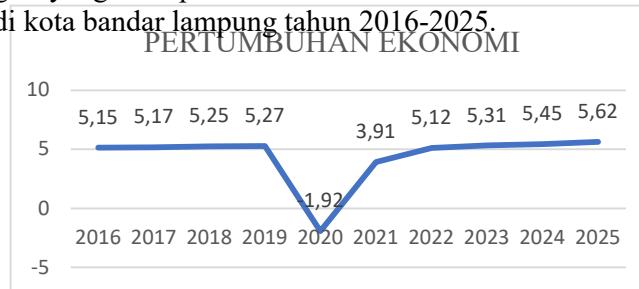
1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fuady, Fuady, and Aulia 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu daerah atau negara yang ditunjukkan melalui kenaikan nilai output barang dan jasa dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional (Yuniarti and Imaningsih 2022). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendorong pembangunan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan keuangan daerah secara efektif (Kristin et al. 2018).

Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi, konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, pendapatan daerah, serta stabilitas sistem keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Miskiyah et al. 2022). Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan maupun pengangguran. Sebaliknya, rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat dan terhambatnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan mengelola anggaran secara efektif agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat secara berkelanjutan (Widya, Nurlaili, and Zulailah 2026). Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi di wilayah Lampung. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari tahun ke tahun. Berikut ini data pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung tahun 2016-2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2025

Berdasarkan grafik diatas pertumbuhan ekonomi kota bandar lampung mengalami fluktuasi.. Pada tahun 2016–2019 pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dan meningkat dari 5,15% menjadi 5,27%, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,92% akibat pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami pemulihan pada tahun 2021 sebesar 3,91% dan terus meningkat hingga mencapai 5,62% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kota Bandar Lampung постепенно kembali stabil dan mengalami peningkatan setelah masa pandemi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai

upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan adalah pajak daerah (Octarrum 2025). Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memperoleh imbalan secara langsung (Siregar and Prilia 2025). Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Aenun and Muhamad 2022).

Peningkatan penerimaan pajak daerah mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik (Rendy and Adhi 2020). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pajak daerah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan (Widya et al. 2026).

Selain pajak daerah, dana perimbangan juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Melalui dana tersebut, pemerintah pusat berupaya mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta meningkatkan pemerataan pembangunan nasional (Muhammad, et all 2025).

Keberadaan dana perimbangan sangat penting bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara maksimal. Dana perimbangan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dukungan dana perimbangan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah (Dana, Terhadap, and Lugastoro 2013).

Namun demikian, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat dapat menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah (Noor et al. 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan dana perimbangan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Muhammad et al. 2025). Berikut ini data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan kota bandar lampung tahun 2016-2025.



Sumber: BAPENDA kota bandar lampung dan DJPK Indonesia

Gambar 1.2

Data pajak daerah dan dana perimbangan kota bandar lampung tahun 2016-2025

Berdasarkan data tahun 2016–2025, pajak daerah dan dana perimbangan Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp612,8 miliar, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan hingga tahun 2020 menjadi Rp255 miliar akibat melemahnya aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Setelah itu, penerimaan pajak daerah kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp460 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, dana perimbangan cenderung lebih stabil meskipun sempat menurun pada tahun 2018–2020, lalu kembali meningkat dari Rp1,145 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,48 triliun pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan masih menjadi sumber utama pendanaan daerah, sedangkan pajak daerah mulai mengalami pemulihan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah setelah pandemi.

Upaya memperkecil ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance) dilakukan melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang diikuti dengan implikasi pendanaan ke daerah. Pemerintah pusat melalui pelaksanaan fungsi distribusi dan stabilisasi berupaya memperkecil horizontal imbalance melalui “kerelaan” daerah-daerah kaya (dengan sumber daya alam melimpah) untuk memberi subsidi daerah-daerah yang kurang beruntung karena ketiadaan sumber daya alamnya (Simarmata 2023).

Menurut Richard A. Musgrave dalam teori keuangan publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta. Fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan pajak dan belanja pemerintah. Sementara itu, fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil (Noor et al. 2022).

Penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait

pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas pengaruh pajak daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung dengan periode penelitian tahun 2016–2025 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai hubungan pajak daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama periode penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pajak daerah dan dana perimbangan merupakan dua komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2016-2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Teori pertumbuhan ekonomi Keynes juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah memperoleh pendapatan pajak yang tinggi, maka pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak terhadap peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Sudiro 2018).

Teori Keuangan Publik

Menurut Richard A. Musgrave dalam teori keuangan publik, pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh sektor swasta (Parmadi 2025). Fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan pajak dan belanja pemerintah. Sementara itu, fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Melalui pengelolaan keuangan publik yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun nasional (Noor et al. 2022).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional yang dikemukakan oleh Richardson, pertumbuhan ekonomi suatu daerah terjadi karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, investasi, dan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal (Todaro and Smith 2011). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, dan penyediaan fasilitas publik. Selain itu, teori basis ekonomi (*economic base theory*) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh sektor basis atau sektor unggulan yang mampu menghasilkan pendapatan dari luar daerah. Semakin berkembang sektor unggulan suatu daerah, maka semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional (Sinaga, Purba, and Panjaitan 2020). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang

efektif, termasuk optimalisasi pajak daerah dan dana perimbangan, menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung tahun 2016–2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel penelitian (sugiyono 2017).

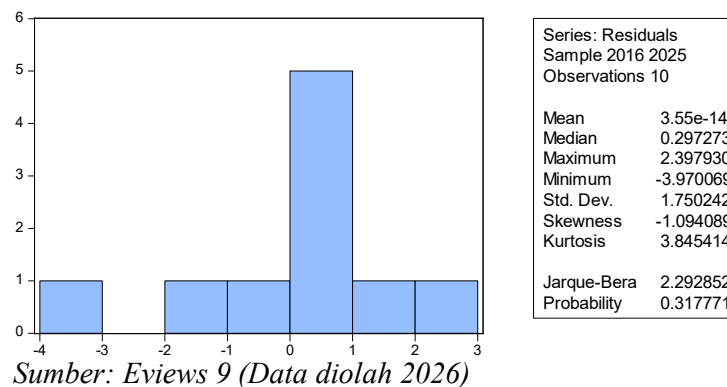
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan memperoleh data serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Sinaga et al. 2020). pada penelitian ini lokasi yang di pilih adalah kota bandar lampung. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan kurun waktu 10 tahun yang diperoleh dari laporan APBD, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan sumber resmi lainnya. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EViews 9 melalui uji asumsi klasik, uji regresi, dan uji koefisien determinasi (*R-Square*) untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung (Dirna 2025). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel di atas. Nilai probability sebesar $0,317771 > 0,05$ dapat disimpulkan pada uji ini data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Contered VIF
C	79376.44	201535.3	NA
PD	0.004454	80591.28	7.142762
DP	247.9718	489212.8	7.142762

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Berdasarkan hasil dari uji multikolineritas yang ditampilkan pada tabel di atas diperoleh bahwa Pajak Daerah (PD), dan dana perimbangan (DP) tidak terdapat multikolineritas karena nilai VIF < 10.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.024597	Prob. F(2,5)	0.2269
Obs*R-squared	4.474646	Prob. Chi-Square(2)	0.1067

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat tabel di atas di peroleh bahwa Prob.Chi-Square = 0,1067 > 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada uji ini

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.518506	Prob. F(2,7)	0.1500
Obs*R-squared	4.184603	Prob. Chi-Square(2)	0.1234
Scaled explained SS	2.917197	Prob. Chi-Square(2)	0.2326

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel di atas di peroleh bahwa Prob Chi-Square = 0,2326 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pada uji ini tidak terdapat heteroskedastisitas

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Table 4.5
Hasil uji regresi linear berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	643.2308	253.9130	2.533272	0.0644
PD	0.444495	0.099830	4.452530	0.0112

DP	-65.38360	18.23661	-3.585293	0.0231
R-squared	0.895113			
F-statistic	17.06814			
Signifikansi (F-statistik)	0.011001			

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Estimasi regresi linear berganda menghasilkan regresi $PE = 643,23 + 0,444 PD - 65,383 DP$ konstanta sebesar 643,23. Menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, pertumbuhan ekonomi akan tetap meningkat sebesar nilai tersebut. Koefisien positif pajak daerah (PD) sebesar 0,444 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 pada variabel tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar koefisiennya. Sebaliknya, koefisien negatif dana perimbangan (DP) sebesar - 65,383 menunjukkan hubungan terbalik, di mana peningkatan pada variabel-variabel tersebut justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Uji Hepotesis

Uji T

Uji-t digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individual memberikan pengaruh parsial dan signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6
Hasil uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	643.2308	253.9130	2.533272	0.0644
PD	0.444495	0.099830	4.452530	0.0112
DP	-65.38360	18.23661	-3.585293	0.0231

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada Tabel 4.6, variabel pajak daerah (PD) menunjukkan nilai t-statistik sebesar 4,452 dengan tingkat signifikansi 0,0112, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PD memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di kota bandar lampung.

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada Tabel 4.6, variabel dana perimbangan (DP) menunjukkan nilai t-statistik sebesar -3,585 dengan tingkat signifikansi 0,0231, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DP memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di kota bandar lampung.

Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan dan menjelaskan apakah semua variabel independen secara kolektif memberikan pengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil uji F

F-statistic	17.06814
Signifikansi (F-statistik)	0.011001

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai F-statistik sebesar 17.06814 dengan tingkat signifikansi 0,0110 ($< 0,05$) menegaskan bahwa regresi linear berganda tersebut signifikan secara statistik. Temuan ini menyiratkan bahwa variabel pajak daerah (PD) dan Dana perimbangan (DP) secara bersamaan berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung pada tahun analisis.

Uji (*R-Square*)

Uji *R-square* digunakan untuk memancarkan tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi atau tekanan pada variabel dependen, sehingga memberikan indikasi regresi melalui pengukuran proporsi varian yang dapat dijelaskan secara statistik.

Tabel 4.8
Hasil Uji *R-square*

R-squared	0.895113
-----------	----------

Sumber: Eviews 9 (Data diolah 2026)

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0.895113. Hal ini menunjuka bahwa variasi variabel dependen yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pajak daerah dan dana perimbangan sebesar 89,51 % dan sisanya 10,49 % dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada Tabel 4.6, variabel pajak daerah (PD) menunjukkan nilai t-statistik sebesar 4,452 dengan tingkat signifikansi 0,0112, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung pada tahun 2016-2025. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Keynes bahwa pengeluaran pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sudiro 2018).

Temuan dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Miswar, Putri, and Dedi 2021) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Hal serupa juga ditemukan (Alpad 2022) dalam penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi aceh.

Di Kota Bandar Lampung, peningkatan pajak daerah setelah pandemi Covid-19 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak reklame menjadi sumber penerimaan penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor pelayanan publik lainnya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil uji-t, variabel dana perimbangan memiliki nilai t-statistik sebesar -3,585 dengan tingkat signifikansi $0,0231 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini dapat terjadi karena tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga mengurangi tingkat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penggunaan dana perimbangan yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasional dibandingkan belanja produktif juga dapat menyebabkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Dana perimbangan merupakan sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pelayanan masyarakat.

Penelitian (Agus and Sayyidati 2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian (Octarrum 2025) juga menunjukkan bahwa transfer daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana perimbangan yang diterima Kota Bandar Lampung digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dapat mengurangi kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi pajak daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai F-statistik sebesar 17.06814 dengan tingkat signifikansi 0,0110 ($< 0,05$) menegaskan bahwa regresi linear berganda tersebut signifikan secara statistik. Temuan ini menyiratkan bahwa variabel pajak daerah (PD) dan Dana perimbangan (DP) secara bersamaan berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota bandar lampung pada tahun analisis. Kombinasi antara peningkatan pendapatan asli daerah dan dukungan dana transfer pusat mampu meningkatkan kapasitas pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, pajak

daerah dan dana perimbangan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0.895113. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pajak daerah dan dana perimbangan sebesar 89,51 % dan sisanya 10,49 % dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pajak daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik. Semakin optimal penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, variabel dana perimbangan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan belum mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat serta belum optimalnya pengelolaan dana perimbangan pada sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana perimbangan serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pajak daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat mampu meningkatkan kapasitas pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagian besar dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan dana perimbangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, pengelolaan pajak daerah dan dana perimbangan yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aenun, Siri, and Ridwan Muhamad. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Laba BUMD , Lain-Lain Yang Sah Terhadap." 1(3):354–64.
- Agus, Sulaeman, and Putri Sayyidati. 2019. "Dana Perimbangan, Belanja Infrastruktur Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi, Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak." 5(2).
- Alpad, Azhari. 2022. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Analysis of the Effect of Regional Taxes on Economic Growth in Aceh Province." 2(2):651–55.
- Dana, D. A. N., Perimbangan Terhadap, and Decta Pitron Lugastoro. 2013. "Analisis Pengaruh Pad Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Di Jawa Timur

Jurnal Ilmiah.

- Dirna, F. C. .. Rachmawati, R. .. Firmansyah, F. .. Sam, M. .. Jaya, A. I. .. Arifin, A. .. & Abubakar, A. 2025. *Statistika Deskriptif: Konsep dan Metode*. 1st ed. PT. Star Digital Publishing.
- Fuady, M. Rafi Farrel, Mirza Fuady, and Fahmi Aulia. 2021. "Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *TATALOKA* 23(4):575–82. doi:10.14710/tataloka.23.4.575-582.
- Kristin, Ari, Prasetyoningrum Uin, Walisongo Semarang, U. Sulia, Sukmawati Uin, and Walisongo Semarang Abstrak. 2018. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(2):217–40.
- Miskiyah, Zakiyatul, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, Mahrus Suhardi, Program Studi, Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, and Unwaha Jombang. 2022. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(9):69–83. doi:http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33.
- Miswar, Yudistira Putri, and Priantara Dedi. 2021. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh." 2:153–69.
- Muhammad, Safurifar, and Yaniral. 2025. "Pengaruh Restribusi Daerah , Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Universitas Samudra." 3(1):111–20.
- Noor, Aulia, Rohmah Alqomariah, Sri Laksmi Pardawanati, Wikan Budi Utami, Hasil Terhadap, Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Boyolali, Jurnal Ilmiah, and Akuntansi Bisnis. 2022. "Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali." 1(2):60–69. doi:10.53088/jikab.v1i2.9.
- Octarrum, Devina. 2025. "Kemandirian Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah : Peran Transfer Fiskal , PAD , Belanja Produktif Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung." 6(2):438–52.
- Parmadi, P. .. Hastuti, D. .. Judijanto, L. .. Kusumastuti, S. Y. .. Nopiah, R. .. Lutfi, M. Y. & Sari, E. 2025. *Ekonomi Pembangunan* . 1st ed. edited by efitra. penerbit buku sonpedia.
- Rendy, Alvaro, and Prasetyo Adhi. 2020. "Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi." 5(2):103–20.
- Simarmata, Y. P. H. .. & Sinaga, M. 2023. "Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia." *In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6:104–7. doi:10.32734/lwsa.v6i1.1679.
- Sinaga, Jefri Alfin, Elidawaty Purba, and Pawan Darasa Panjaitan. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun Oleh : " 2(1):40–48.
- Siregar, Wahyuni, and Fani Inka Prilia. 2025. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Daerah Dan Kemiskinan Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Gorontalo." 3.
- Sudiro, Sumarkoco. 2018. *Peranan Dan Tanggung Jawabnya. Dalam Sudiro, e.d & Toruan (Penyunting). Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia Perkembangan Pemikiran 1965 – 1981* . Jakarta: PT. Gramedia.
- sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

***PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2025***

Kombinasi, Dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung .

Todaro, M. P., and S. C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. 11th ed. Penerbit Erlangga.

Widya, Anggraini, Nurlaili, and Zulaikah. 2026. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2024.” 08(01):112–38.

Yuniarti, Qorina, and Niniek Imaningsih. 2022. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sidoarjo.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6(1):44. doi:10.33087/ekonomis.v6i1.474.